PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412
Telp.(0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 09 /K/411.200/2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab I Huruf A pada latar belakang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Aparatur memiliki peran dan konstribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu disusun rencana aksi terhadap konstribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Penanggungjawab Pelaksana, Anggaran dan Jadwal Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 07 JAN 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 09 /K/411.200/2025
TANGGAL : 07 - 01 - 2025
TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP				32%	Melakukan Pengembangan Kompetensi SDM APIP	√	√	√	√	991.160.000	Seluruh ASN	Inspektur
							Pendampingan Penyusunan Register Risiko				√	7.500.000	Irban I-IV	
							Melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko	√				4.000.000	Irban I-IV	
							Rapat persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi		√			500.000	Irban IV	
							Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP		√			-	Irban I-IV	
							Melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP		√			10.620.000	Irban I-IV	
							Melaksanakan pendampingan dan asistensi Fraud Control Plan			√		5.000.000	Irban V	
							Melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi	√	√	√	√	488.329.780	Irban V	
2	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai Kapabilitas APIP				3,010	Menyusun Rencana Aksi atas AOI	√				-	Sekretariat	
							Melakukan Koordinasi dengan BPKP terkait Rencana Aksi atas AOI	√				-	Sekretariat	
							Melakukan Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP			√		1.620.000	Sekretariat, Irban I-V	
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko				3,200	Melakukan evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	√				1.500.000	Irban I-IV	
							Melakukan Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah		√			2.500.000	Irban III	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Melakukan pendampingan penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah			√		-	Irban III	
							Melakukan pendampingan penyusunan Risiko Strategis Organisasi (RSO) dan Risiko Operasional Organisasi (ROO) Perangkat Daerah				√	7.500.000	Irban I-IV	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB			76%		Melakukan pra evaluasi SAKIP	√				-	Irban II	
							Melakukan evaluasi SAKIP		√			5.750.000	Irban II	
5	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti				90,50%	Menginput tindak lanjut pada aplikasi SIPTL			√		-	Sekretariat	
							Membuat surat pemberitahuan pemantauan tindak lanjut kepada obwas (TL Internal)	√	√	√	√	-	Sekretariat	
							Melaksanakan pembahasan evaluasi berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP		√		√	70.008.000	Sekretariat, Irban I-IV	
							Mendokumentasikan berita acara tindak lanjut hasil pengawasan internal		√		√	-	Sekretariat	
							Menyusun laporan hasil evaluasi berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	√	√	√	√	-	Sekretariat	
6	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti				94,90%	Membuat rencana aksi tindak lanjut (BPK)		√			-	Sekretariat	
							Membuat surat penagihan kepada obrik (BPK)		√			-	Sekretariat	
							Mendokumentasikan bukti dukung tindak lanjut (BPK)		√			-	Sekretariat	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Merekap tindak lanjut auditee pada form excel pemantauan tindak lanjut BPK RI		√			3.600.000	Sekretariat	
7	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center for Prevention (MCP)*				92	Melakukan rapat koordinasi terkait MCP KPK	√				15.000.000	Irban V	
							Melakukan monitoring MCP KPK		√		√		Irban V	
1	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP				70%						940.611.700		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti				92%						737.366.700		
		Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti				80%								
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu				100%								
		Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko				35 OPD								
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah				4 laporan	Audit kinerja penurunan stunting		√			154.786.000	Irban IV	Inspektur
							Audit kinerja peningkatan investasi				√		Irban III	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja				1 laporan	Melakukan reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024	√				31.424.000	Irban I	
							Melakukan Reviu RPJMD 2025-2030		√				Irban I	
							Melakukan Reviu Kinerja Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1					Irban IV	
							Melakukan reviu Renstra 2025-2030		√				Irban I-IV	
							Melakukan reviu internal sejawat	√					Irban I-V	
							Melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada dispendukcapil			√			Irban I	
							Melakukan reviu PAPBJ		√	√	√		Irban II	
							Melakukan telaahan sejawat eksternal		√				Irban I dan III	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Melakukan reviu pengelolaan BMD		√				Irban III	
							Melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada Dinas Pendidikan			√			Irban III	
							Melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada DPMPTSP				√		Irban III	
							Melakukan reviu Manajemen ASN	√					Irban IV	
							Melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas				√		Irban IV	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan				119 laporan	Melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024	√				44.520.000	Irban III	
							Melakukan reviu RKPD Perubahan tahun 2025		√				Irban I	
							Melakukan reviu RKPD tahun 2026		√				Irban I	
							Melakukan reviu renja perubahan perangkat daerah tahun 2025			√			Iban I-IV	
							Melakukan reviu renja perangkat daerah tahun 2026			√			Iban I-IV	
							Melakukan reviu rencana kerja dan anggaran SKPD TA 2026			√			Iban I-IV	
							Melakukan reviu rencana kerja dan anggaran perubahan SKPD TA 2025			√			Iban I-IV	
							Melakukan reviu rancangan KUA-PPAS tahun 2026		√				Irban III	
							Melakukan reviu rancangan KUA-PPAS perubahan tahun 2025			√			Irban III	
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa				20 laporan	Melakukan audit ketaatan pengelolaan dana desa	√	√			54.000.000	Irban I	
							Melakukan audit ketaatan pengelolaan dana desa	√	√	√			Irban II	
							Melakukan audit ketaatan pengelolaan dana desa	√					Irban III	
							Melakukan audit ketaatan pengelolaan dana desa		√	√			Irban IV	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk				1 kesepakatan	Melakukan rapat internal terkait acara gelar pengawasan	√				52.178.200	Sekretariat, Irban I-V	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Membuat konsep buku gelar pengawasan	√					Sekretariat	
							Pelaksanaan acara gelar pengawasan	√					Sekretariat	
	Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP				6 dokumen	Membuat rencana aksi tindak lanjut (BPK)		√			400.458.500	Sekretariat	
							Membuat surat penagihan kepada obrik (BPK)		√				Sekretariat	
							Mendokumentasikan bukti dukung tindak lanjut (BPK)		√				Sekretariat	
							Merekap tindak lanjut auditee pada form excel pemantauan tindak lanjut BPK RI		√				Sekretariat	
							Menginput tindak lanjut pada aplikasi SIPTL			√			Sekretariat	
							Membuat surat pemberitahuan pemantauan tindak lanjut kepada obwas (TL Internal)	√	√	√	√		Sekretariat	
							Melaksanakan pembahasan evaluasi berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP		√		√		Sekretariat, Irban I-IV	
							Mendokumentasikan berita acara tindak lanjut hasil pengawasan internal		√		√		Sekretariat	
							Menyusun laporan hasil evaluasi berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	√	√	√	√		Sekretariat	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan				2 laporan						203.245.000		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah				1 laporan	Melakukan audit PKKN setelah menerima permintaan dari Aparat Penegak Hukum				√	32.410.000	Irban V	
							Ekspose hasil audit				√		Irban V	
							Pemberian keterangan ahli dipersidangan				√		Irban V	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu				1 laporan	Monitoring Pengendalian inflasi daerah	√	√	√	√	170.835.000	Irban II	
							Melakukan evaluasi kinerja BUMD (BPR Anjuk Ladang)	√					Irban I	
							Melakukan evaluasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten			√			Irban I	
							Melakukan PDTT atas Bansos			√			Irban I	
							Melakukan PDTT atas Hibah				√		Irban I	
							Melakukan evaluasi RKPDES				√		Irban I	
							Melakukan audit honorarium				√		Irban I	
							Melakukan evaluasi APBDES				√		Irban I	
							Pemantauan cash opname				√		Irban I-IV	
							Melakukan audit TIK	√					Irban II	
							Melakukan audit perjalanan dinas		√				Irban II	
							Melakukan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)			√	√		Irban II	
							Melakukan evaluasi kinerja BUMD (PDAM)			√			Irban II	
							Melakukan reviu Pengelolaan Dana BOS				√		Irban II	
							Melakukan pengawasan dengan tujuan atas bantuan keuangan				√		Irban II	
							Melakukan reviu gaji PPPK		√	√	√		Irban III	
							Melakukan reviu SHS dan ASB		√				Irban III	
							Melakukan evaluasi kinerja BUMD (PDAU)		√				Irban IV	
							Monitoring SPT Tahunan ASN	√	√				Irban V	
							Pengawasan amanat Kepala daerah/Bupati				√		Irban I-IV	
							Audit pengaduan pada irban hadapan				√		Irban I-IV	
							Melakukan reviu DAK				√		Irban I-IV	
							Melakukan reviu DAU				√		Irban I-IV	
							Melakukan reviu BTT				√		Irban III	
							Penilaian arsip				√		Irban III	
							Melakukan reviu kelebihan pembayaran pajak daerah				√		Irban IV	
							Pengawasan pengadaan PPPK				√		Irban IV	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengawasan pengadaan CPNS				√		Irban IV	
							Probity audit				√		Irban V	
							Reviu HPS Proyek strategis				√		Irban V	
							PDTT audit investigatif				√		Irban V	
2	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)				15%						1.500.669.562		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional				2 kegiatan						330.910.000		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun				1 rekomenasi	Menyusun kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (Tahun 2025) pada masing-masing irban	√				142.910.000	Irban I-IV	
							Rapat Koordinasi hasil Penyusunan Kertas Kerja PPBR (Tahun 2025)	√					Sekretariat, Irban I-IV	
							Pembuatan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2025	√					Sekretariat	
							Mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan PKPT Berbasis Risiko (Tahun 2026)				√		Sekretariat, Irban I-V	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun				1 rekomendasi	Membuat pemberitahuan kepada obwas yang akan dilakukan klinik konsultasi		√			188.000.000	Sekretariat	
							Pelaksanaan klinik konsultasi dengan Narasumber dari Inspektorat		√				Irban I-V	
							Membuat laporan dari hasil klinik konsultasi		√				Irban I-V	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi				52 OPD						1.169.759.562		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah				52 Perangkat Daerah	Melakukan Pra Evaluasi SAKIP	√				397.850.060	Irban II	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Melakukan Evaluasi SAKIP		√				Irban II	
							Melakukan monitoring TL SAKIP			√			Irban II	
							Melakukan evaluasi manajemen risiko perangkat daerah	√					Irban I-IV	
							Melakukan evaluasi manajemen risiko pemda		√				Irban III	
							Melakukan Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		√		√		Irban I-IV	
							Melakukan pendampingan penyusunan risiko strategis pemda (RSP)			√			Irban I-V	
							Melakukan pendampingan penyusunan Risiko Strategis Organisasi (RSO) dan Risiko Operasional Organisasi (ROO) Perangkat Daerah			√	√		Irban I-IV	
							Melakukan pendampingan PM maturitas SPIP			√			Irban I-V	
							Melakukan Penjaminan Kualitas maturitas SPIP			√			Irban IV	
							Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP			√			Sekretariat, Irban I-V	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampinan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi				52 Perangkat Daerah	Melakukan evaluasi RB	√	√	√	√	68.020.000	Irban V	
							Melakukan pendampingan dan asisteni ZI dan RB				√		Irban V	
							Melakukan evaluasi ZI		√				Irban V	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran (Rp)	Pelaksana	Penanggungjawab
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi				3 kegiatan	Melakukan monitoring MCP KPK		√	√	√	665.989.502	Irban V	
							Melakukan perumusan kebijakan anti korupsi	√		√			Irban V	
							Sosialisasi antikorupsi	√	√		√		Irban V	
							Pengendalian Gratifikasi	√	√	√	√		Irban V	
							Melakukan evaluasi kebijakan anti korupsi			√	√		Irban V	
							Koordinasi saber pungli		√	√			Irban V	
							Kegiatan hakordia antikorupsi				√		Irban V	
							Pendampingan desa antikorupsi				√		Irban V	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas				52 Perangkat Daerah	Sosialisasi SPI Tahun 2025		√			37.900.000	Irban V	
							Penyampaian data responden SPI		√				Irban V	
							Melakukan pemantauan SPI		√	√			Irban V	

Nganjuk, 1-01-2025

a.n BUPATI NGANJUK
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010